



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 118/Pdt.P/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang diluar gedung telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) antara:

Abdul Gani Bin Abdul Rahman, Umur 57 tahun, Agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Pulau Rinca RT 002 RW 002, Desa pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Jumiati Binti Muhamad, Umur 52 tahun, Agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Pulau Rinca RT 002 RW 002, Desa pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa saksi –saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2017 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: 118/Pdt.P/2017/PA.Lbj tanggal 02 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1981 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Muhamad dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 25.000, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Muh. Saleh, 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. M. Nur, 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam II, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. Rasnawati Binti Abdul Gani
 - b. Abdul Hafid Bin Abdul Gani
 - c. Nadia Binti Abdul Gani
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1981 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah ;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
 - 3) Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 30 Desember 1981 adalah sah secara hukum;
 - 4) Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang prosedur dan proses mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah, dan para Pemohon menyatakan paham dan mengerti, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, telah terjadi perubahan permohonan oleh para Pemohon mengenai jumlah anak, yang sebenarnya 6 (enam) orang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Saleh bin Lakamis Mantuana, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 1981 secara Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan sudah dikaruniai enam orang anak;
- bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad bin Ihi;
- bahwa, yang menjadi saksi adalah Muhamad Saleh bin Lakamis Mantuana, dan Muhamad Nur bin Hasan, dengan mas kawin berupa uang Rp.25.000,- tunai;
- bahwa saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat setempat;
- bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau kedua-duanya berpindah agama;

- bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengakui status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus pembuatan buku nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. Muhamad Nur Bin Hasan umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 1981 secara Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan sudah dikaruniai enam orang anak;
- bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad bin Ihi;
- bahwa, yang menjadi saksi adalah Muhamad Saleh bin Lakamis Mantuana, dan Muhamad Nur bin Hasan, dengan mas kawin berupa uang Rp.25.000,- tunai;
- bahwa saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat setempat;
- bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau kedua-duanya berpindah agama;
- bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengakui status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus pembuatan buku nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, namun tidak ada pihak yang datang dan merasa kebaratan dengan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Buku Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku tersebut untuk digunakan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama Muhamad Saleh Bin Lakamis Mantuana, dan Muhamad Nur Bin Hasan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan keduanya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 1981 menurut agama Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- bahwa, mas kawin pernikahannya adalah uang Rp.25.000,- tunai;
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Muhamad Saleh bin Lakamis Mantuana, dan Muhamad Nur Bin Hasan;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak;
- bahwa, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 1981 menurut agama Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- ✓ bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa uang Rp.25.000,- tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- ✓ bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1981 menurut agama Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma diterima oleh Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Sela yang telah dijatuhkan, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dalam membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ABDUL GANI Bin ABDUL RAHMAN**) dengan Pemohon II (**JUMIATI Binti MUHAMAD**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1981 di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.0,- (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang diluar gedung Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami **Drs.H.Muhtar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Harifa,S.EI**, dan **Rasyid Rizani,S.HI,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh anggota majelis tersebut, dibantu oleh **H.Abdul Muridan,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HARIFA,S.EI

DRS.H.MUHTAR,M.H.

Hakim Anggota II,

RASYID RIZANI,S.HI. M.H.I

Panitera Pengganti,

H.ABDUL MURIDAN,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 0,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. Meterai	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,- (NIHIL)